

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil analisis pengaruh “Persentase Penduduk Miskin, IPM, dan TPT terhadap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Banten selama periode 2014-2023” dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Variabel Persentase Penduduk Miskin (PPM) memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan yang negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan secara langsung menurunkan tingkat output ekonomi regional. Semakin tinggi angka kemiskinan, maka semakin rendah daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menurunkan konsumsi dan permintaan agregat dalam perekonomian daerah, sesuai dengan pandangan teori Keynes.
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan yang positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Artinya, peningkatan IPM yang mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Banten. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi umumnya memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan konsumsi rumah tangga yang lebih besar, sehingga mempercepat pertumbuhan PDRB.
3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan TPT belum memberikan dampak yang cukup kuat terhadap penurunan PDRB secara statistik. Kemungkinan ini disebabkan oleh adanya sektor informal atau usaha mikro yang menyerap tenaga kerja secara tidak resmi, serta struktur ekonomi Banten yang mungkin tidak terlalu tergantung pada tenaga kerja formal.

5.2 Saran

Melalui penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan sejumlah saran yang ingin disampaikan berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan:

a) Saran Teoritis

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan variabel bebas lain yang juga berpengaruh terhadap PDRB, seperti tingkat investasi daerah, Indeks Ketimpangan (Gini Ratio), pengeluaran pemerintah daerah, dan jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penelitian ke depan juga diharapkan memperluas cakupan data, baik dari sisi jumlah kabupaten/kota dalam provinsi Banten maupun perbandingan antardaerah dalam lintas provinsi, serta memperpanjang rentang waktu observasi agar dapat melakukan analisis tren dan memberikan hasil yang lebih representatif dan generalisabel.
3. Disarankan penggunaan metode analisis yang lebih kompleks, seperti *model Fixed Effect panel, instrumental variable*, atau *Vector Error Correction Model (VECM)*, guna mengeksplorasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara indikator sosial-ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih mendalam.

b) Saran Praktis

1. Pemerintah Provinsi Banten disarankan untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis data dan lokasi. Program seperti bansos produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan penguatan sektor informal perlu diarahkan pada wilayah dengan kemiskinan tinggi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan PDRB.
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat investasi pada pembangunan manusia, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan, karena peningkatan IPM terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur sekolah dan layanan kesehatan yang merata, serta program beasiswa dan pelatihan tenaga medis dan pendidik.
3. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan

dalam mengatasi pengangguran struktural. Pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal serta link-and-match antara sekolah kejuruan dan dunia bisnis dapat mengembangkan keterampilan tenaga kerja lokal dan secara tidak langsung memperkuat kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan PDRB.